

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Aliya Hajar Salsabila
NIM : 20150610438
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT
SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG
RUMAH SAKIT
Dosen Pembimbing : Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

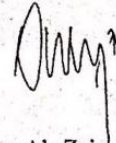
Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 18-06-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I

PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT
SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG
RUMAH SAKIT

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	6%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
5	www.pharmasindo.com Internet Source	2%
6	pt.scribd.com Internet Source	1%
7	konsultanperizinan.com Internet Source	1%

marzulhendri.blogspot.com

8	Internet Source	1%
9	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
11	www.pps.unud.ac.id Internet Source	1%
12	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
13	Khoirul Anam. "Tanggungjawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	1%
14	siskum.kotabogor.go.id Internet Source	1%
15	www.scribd.com Internet Source	1%
16	eprints.unika.ac.id Internet Source	1%

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Aliya Hajar Salsabila

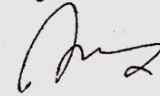
NIM : 20150610438

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kema Redaksi,


Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 20 Juli 2019
Yang memeriksa;



Wiwit Widarti, S.E.I.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Kepada Yth:

Nomor : 074/363/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 016/A.4-III/2019
Tanggal : 5 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN TETAP PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT"** kepada:

Nama : ALIYA HAJAR SALSABILA
NIM : 20150610438
No.HP/Identitas : 081393309624/3509115604970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 1 Februari 2019 s.d 31 Juli 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196610261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 28 Pebruari 2019

Nomor : 070/ 2095 /209.4/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Walikota Madiun
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
MADIUN

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/363/Kesbangpol/2019
Tanggal : 11 Januari 2019

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Aliya Hajar Salsabila
Ala m a t : Jl. Jayadadu No. 2 Josanan, Taman Madiun
Pekerjaan : Mahasiswa (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Tetap Pada Rumah sakit Swasta di Kota Madiun Setelah Bertakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit"
Tujuan/bidang : Mencari data , skripsi / Hukum
Dosen pembimbing : Beni Hidayat, SH., M.Hum
Peserta : -
Waktu : 3 bulan
Lokasi : Kota Madiun

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NIP. 196201101989031006

Tembusan :

1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137

Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153

Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 299 /401.205/2019

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 070/2095/209.4/2019 Perihal Penelitian / Survey/Research.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ALIYA HAJAR SALSABILA

Tempat/tgl. Lahir : JOMBANG, 16 APRIL 1997

Alamat : JL. JOYODANU NO. 2 RT. 002 RW. 001 KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Judul penelitian : Pelaksanaan izin penyelenggaraan tetap pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tujuan penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi

Tempat penelitian : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

Waktu penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang penelitian : Ekonomi

Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswi S 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Anggota peneliti : -

- Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 1 Maret 2019

PIt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



L. DARMAWAN S, SIP. MSI

Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 198903 1 005

Tembusan :

1. Bp. Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim.